

# PROSEDUR PELAYANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK



1. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:
  - a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
  - b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.
2. Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan sebagai berikut:
  - a. Identitas pemohon yang sah
  - b. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menkumham dan telah tercatat di Berita Negara RI dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum
  - c. Bukti permohonan informasi kepada Badan Publik,
  - d. Bukti keberatan kepada Badan Publik,
3. Pada hari pertama sidang adjudikasi, diwajibkan para pihak untuk menempuh proses penyelesaian sengketa melalui mediasi terlebih dahulu dalam hal penolakan permohonan informasi atas alasan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g UU KIP,
4. Dalam hal penolakan permohonan informasi berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf a UU KIP, Maka persidangan langsung memeriksa pokok sengketa tanpa melalui mediasi.
5. Pasal 35 UU KIP menyebutkan bahwa Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID berdasarkan alasan berikut:
  - a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
  - b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
  - c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
  - d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
  - e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
  - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
  - g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini
6. para pihak pemohon dan termohon yang tidak dapat menerima putusan memiliki hak banding selama 14 hari kerja dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan